

Submission: 03 September 2025

e-ISSN: 2987-405X

Publication: 30 Oktober 2025

Page: 86-99

PERSEPSI MASYARAKAT PESISIR TERHADAP PERAN POLISI PERAIRAN DALAM MENJAGA KEAMANAN LAUT DI KABUPATEN SORONG

Ronny Eduardo Zadrak Osok¹, Siti Nurul Nikmatul Ula^{2*}, Akhmad Faqih Mursid³

^{1,2}Program Studi Sosiologi, FISIP, Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

³Program Ilmu Hukum, FH Universitas Muhammadiyah Sorong. Indonesia

*Korespondensi: sn396396@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.33506/pjs.v3i2.5406>

Abstract

The Water Police (Polair) acts as a law enforcement agency that plays a strategic role in maintaining security and order in Indonesian waters. However, the role of the water police does not only depend on the implementation of security tasks, law enforcement and policies, but also on how coastal communities view and accept the presence of the water police. This study aims to determine the perceptions and motivating factors of coastal communities regarding the role of the water police in maintaining maritime security in Warmon Village, Sorong Regency. The research method used is a qualitative descriptive study in the form of written or spoken words from people and observed behaviour through data collection techniques such as observation and documentary interviews. The results of the study show that the perception of coastal communities towards the Water Police in maintaining maritime security in Warmon Village, Sorong Regency, tends to be positive. This was obtained from the results of interviews related to communication and information, social interaction, security and law enforcement, as well as motivating factors for perception based on direct experience, social environment, the influence of mass media and social media, and local values and culture. These positive perceptions serve as social capital in building a synergistic partnership between coastal communities and the Water Police in maintaining the security and sovereignty of Indonesia's maritime territory.

Keywords: Perception; Coastal Communities; Water Police; Sorong Regency

Abstrak

Polisi Perairan (Polair) berperan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Namun peran polisi perairan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tugas-tugas keamanan, penegakan hukum dan kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat pesisir memandang dan menerima kehadiran polisi perairan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan faktor pendorong dari masyarakat pesisir terhadap peran polisi perairan dalam menjaga keamanan laut di Kelurahan Warmon Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pesisir terhadap Polisi Perairan dalam menjaga keamanan laut di Kelurahan Warmon Kabupaten Sorong cenderung positif. Hal ini diperoleh dari hasil wawancara terkait segi komunikasi dan informasi, interaksi sosial, keamanan dan penegakan hukum, serta faktor pendorong persepsi dilihat dari pengalaman langsung, lingkungan sosial, pengaruh media massa dan media sosial, dan nilai-nilai dan budaya local. Persepsi yang positif tersebut menjadikan modal sosial dalam membangun kemitraan yang sinergis antara masyarakat pesisir dan polisi perairan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Kata Kunci: Persepsi; Masyarakat Pesisir; Polisi Perairan; Kabupaten Sorong

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir yang bermukim di sepanjang garis pantai sangat bergantung pada sumber daya laut untuk kehidupan sehari-hari, terutama dalam sektor perikanan, perikanan

perdagangan dan transportasi laut (Marasabessy et al., 2023; Kusumastanto & Wahyudin, 2012). Namun keberlangsungan sektor maritim tidak terlepas dari berbagai ancaman, baik yang bersifat ekonomi, sosial,

maupun keamanan, seperti pencurian ikan (illegal fishing), perampukan, penyelundupan, serta konflik antar nelayang (Bueger, 2015). Oleh karena itu keamanan laut menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat pesisir, dengan adanya aparat keamanan seperti Polisi Perairan (Polair) menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas di wilayah pesisir dan praian Indonesia (Runtukahu, 2016).

Polisi Perairan (Polair) sebagai bagian dari kepolisian yang bertanggung jawab terhadap hukum maritim. Polisi Perairan (Polair) berperan sebagai aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan Indonesia. Tugas tersebut meliputi patroli laut, penegakan hukum terhadap pelanggaran maritim, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat pesisir tentang peraturan kelautan yang berlaku (Aprizal et al., 2024). Untuk melindungi sumber daya laut dari eksploitasi ilegal, maka dilakukan pengawasan yang mana diharapkan aktivitas ilegal tersebut dapat diminimalisasi, sehingga ekosistem laut tetap terjaga dan masyarakat pesisir dapat menjalankan aktivitas mereka dengan aman, khususnya bagi para nelayan dalam menjalankan aktivitasnya (Jamilah, & Disemadi, 2020).

Namun epektivitas peran Polisi Perairan tidak hanya bergantung pada pelaksanaan tugas-tugas keamanan, penegakan hukum dan kebijakan yang diterapkan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat pesisir memandang dan

menerima kehadiran polisi perairan (Tyler, 2004). Perspsi masyarakat terhadap aparat keamanan atau polisi perairan menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan tingkat keberhasilan upaya pengamanan laut yang dilakukan oleh aparat Polisi Perairan. Jika masyarakat kepercayaan dan pemahaman yang baik tentang peran polisi perairan, maka akan dapat membangun hubungan yang harmonis antara polisi perairan dan masyarakat pesisir, sehingga dapat meningkatkan kerjasama dalam menjaga keamanan laut (Skogan, 2006).

Dalam prakteknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjaga keamanan laut. Tantangan tersebut seperti kurangnya kesadaran hukum di masyarakat pesisir, terutama terkait dengan aturan perairan dan perizinan penangkapan ikan, karena minimnya pemahaman mengenai peraturan tersebut, sehingga menyebabkan timbul ketidakpuasan masyarakat pesisir terhadap keberadaan aparat keamanan (Hekin et al., 2025). Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur yang menjadi kendala dalam optimalisasi tugas polisi perairan. Beberapa wilayah pesisir yang jauh dari pusat administrasi sering kali tidak mendapatkan pengawasan yang memadai akibat minimnya armada patrol, fasilitas komunikasi dan jumlah personel yang tidak memadai (Firmansyah, 2025). Hal ini membuka celah bagi berbagai aktivitas ilegal yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat.

Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi dalam mendukung keamanan maritim juga menjadi suatu keharusan. Menurut (Sarjito, 2023) teknologi seperti sistem pemantauan berbasis satelit dan aplikasi pelaporan digital dapat membantu meningkatkan efektivitas pengawasan wilayah perairan. Di sisi lain, masyarakat pesisir juga perlu diberikan edukasi mengenai pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan keselamatan dan efisiensi kerja mereka di laut (Maruf, 2024). Dengan adanya sistem ini, masyarakat pesisir juga dapat turut serta dalam mengawasi wilayahnya dan melaporkan aktivitas mencurigakan secara lebih cepat kepada pihak berwenang.

Maka diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan berbasis partisipasi masyarakat dalam upaya menjaga keamanan laut. Polisi Perairan tidak hanya bertugas sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang kondusif di wilayah pesisir (Ningtyas et al., 2025). Melalui pendekatan komunikasi yang lebih baik, seperti program sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan kesadaran hukum masyarakat dapat meningkat dan hubungan antara Polisi Perairan dan masyarakat dapat terjalin dengan lebih baik (Danial, 2015).

Akan tetapi di dalam realitanya masih terdapat minimnya pemahaman masyarakat terkait peraturan atau kebijakan yang berlaku terkait kelautan, sehingga berdampak pada persepsi masyarakat pesisir terhadap peran

polisi perairan. Selain itu juga terdapat beberapa faktor lain seperti pengalaman personal terkait interaksi dengan polisi perairan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Di daerah Papua Barat Daya, khususnya pada Kelurahan Warmon Distrik Aimas Kabupaten Sorong masih terdapat nelayan yang secara tidak sadar telah melanggar aturan dalam penangkapan ikan illegal dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang (*illegal fishing*) seperti pukat harimau (*trawl*), bom ikan, atau potassium sianida, tidak mengantongi surat izin penangkapan ikan (SICI) seperti Banyak nelayan tradisional atau kecil tidak mengurus dokumen legal karena merasa tidak mampu atau tidak memahami prosesnya, dan Pembuangan limbah kelaut seperti membuang sampah rumah tangga atau limbah hasil tangkapan ke laut secara langsung, serta penangkapan ikan dikawasan terlarang.

Kebanyakan pelanggaran tersebut muncul bukan hanya karena niat melanggar hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan kurangnya sosialisasi dari aparat terkait. masyarakat pesisir sering kali berada dalam posisi dilema: antara memenuhi kebutuhan hidup dan menaati aturan. Oleh karena itu, peran Polisi Perairan tidak cukup hanya melakukan penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi, pendekatan kultural, dan pemberdayaan ekonomi alternatif.

Selain itu, masih terdapat persepsi negatif terhadap aparat keamanan yang berkembang di kalangan masyarakat pesisir. Beberapa masyarakat menganggap bahwa keberadaan Polisi Perairan lebih banyak memberikan hambatan dari pada manfaat bagi mereka, seperti adanya praktik pungutan liar dan ketidakadilan dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum tertentu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Perairan menjadi rendah, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi efektivitas Polisi Perairan dalam melaksanakan tugasnya serta menghambat kerja sama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan laut secara keseluruhan.

Pemahaman terhadap persepsi masyarakat pesisir mengenai peran Polisi Perairan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan keamanan laut. Dengan mengetahui bagaimana masyarakat melihat peran Polair, aparat kepolisian dapat melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang ada serta merancang strategi komunikasi yang lebih efektif. Hal ini akan membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik antara Polisi Perairan dan masyarakat pesisir.

Dengan adanya penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Peran Polisi Perairan Dalam Menjaga Keamanan Laut Di Kabupaten Sorong.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menggali secara mendalam persepsi masyarakat pesisir terhadap peran Polisi Perairan dalam menjaga keamanan laut di Kabupaten Sorong. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami realitas sosial berdasarkan pengalaman subjektif, pandangan, serta makna yang dibangun oleh masyarakat terkait keberadaan dan kinerja aparat kepolisian perairan (Denzin & Lincoln, 2011). Subjek penelitian ditentukan secara purposive, meliputi nelayan, tokoh masyarakat pesisir, aparat desa, serta personel Polisi Perairan yang bertugas di wilayah perairan Kabupaten Sorong.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai tingkat kepercayaan, pengalaman interaksi, persepsi terhadap pelayanan, serta penilaian masyarakat terhadap efektivitas pengawasan laut. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas pengamanan, pola interaksi antara masyarakat dan aparat, serta kondisi sosial di wilayah pesisir. Dokumentasi berupa arsip, laporan kegiatan, dan kebijakan terkait keamanan laut digunakan sebagai data pendukung (Creswell, 2014).

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Keabsahan data dijaga

dengan teknik triangulasi sumber dan metode, serta member check kepada informan kunci. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai persepsi masyarakat pesisir terhadap peran Polisi Perairan dalam menjaga keamanan laut di Kabupaten Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Polisi Perairan Dalam Menjaga Keamanan Laut

Keamanan laut menjadi isu penting bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sektor kelautan untuk kehidupan sehari-hari. Polisi Perairan (Polair) berperan sebagai garda depan dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah perairan (Saifulloh & Simabura, 2023). Persepsi masyarakat terhadap kinerja Polair mencerminkan keberhasilan tugas kepolisian dalam membangun rasa aman serta kepercayaan publik.

Menurut (Gilovich et al., 2018) persepsi terbagi menjadi 2 yaitu persepsi yang sifatnya positif dan persepsi yang sifatnya negatif. Persepsi tersebut dihasilkan setelah seorang individu melakukan interaksi dengan obyek-obyek yang dipersepsikan. Interaksi ini biasanya dihasilkan pada saat komunikasi dan informasi pada masyarakat, interaksi social pada masyarakat, serta keamanan dan penegakan hukum.

Komunikasi dan informasi. sebagian besar masyarakat pesisir menyatakan bahwa

keterbukaan informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh polisi perairan sangat memengaruhi cara pandang mereka terhadap institusi tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu HK, (43 tahun), selaku Kepala Kelurahan Warmon, beliau mengatakan bahwa:

“saya melihat bahwa mereka itu cukup tegas dan sigap dalam menangani keamanan di pesisir pantai, mereka itu aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang hukum laut, keselamatan laut, aturan-aturan dalam penangkapan ikan dan alat yang akan digunakan dalam menangkap ikan, serta saya sering mendengar mereka membantu nelayan pada saat melaut” (wawancara pada tanggal 24 April 2025)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak EK, (67 tahun), selaku Ketua Adat, bahwa:

“Mereka sering aktif dalam memberikan sosialisasi di tempat kami, jadi kami lebih paham soal aturan laut. Mereka ngasih penjelasan yang gampang dimengerti, dan kami merasa dihargai. Mereka juga terbuka dan ramah kalau kami mau tanya. Jadi, kami nggak takut lagi nelayan ditangkap gara-gara salah aturan, karena kami udah tahu batasan yang boleh dan nggak boleh.” (wawancara pada tanggal 24 April 2025).

Hasil wawancara dengan Ibu HK dan Bapak EK menunjukkan bahwa pentingnya komunikasi langsung yang bersifat edukatif dan membangun kepercayaan. Kehadiran polisi perairan secara berkala dan cara penyampaian informasi yang mudah dipahami meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap mereka.

Sedangkan menurut Bapak GH, (33 tahun), selaku Ketua Kelompok Nelayan, beliau menyatakan bahwa:

“Kalau saya lihat, sekarang ini hubungan masyarakat dengan polisi perairan jadi lebih baik karena ada komunikasi dua arah. Dulu kita merasa was-was kalau lihat kapal patroli. Tapi sekarang, mereka datang bukan cuma periksa, tapi juga diskusi. Kadang kami diajak rembug soal rencana pengawasan laut dan kita diikut sertakan. Itu yang bikin kami merasa punya peran.” (wawancara pada tanggal 24 April 2025).

Dari wawancara tersebut terjadi perubahan pendekatan dari sebelumnya represif menjadi lebih partisipatif. Komunikasi dua arah membuat masyarakat merasa dihargai pendapatnya, sehingga membentuk persepsi bahwa polisi perairan adalah mitra, bukan semata-mata pengawas.

Lain halnya dengan yang dikatakan Ibu MK, (29 tahun), selaku masyarakat setempat, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau polisi perairan datang ke kampung untuk penyuluhan, biasanya mereka cuma bicara sama kepala desa atau ketua nelayan dan bapak-bapak para nelayan. Sedangkan ibu-ibu seperti kami jarang dilibatkan. Padahal kami juga sering ikut melaut atau kirim makanan ke kapal. Kalau ada informasi, sebaiknya semua warga tahu, bukan cuma bapak-bapak atau suami kita.” (wawancara pada tanggal 25 April 2025).

Wawancara dengan Ibu MK

Menunjukkan bahwa kurangnya pemerataan informasi terutama kepada kelompok perempuan. Komunikasi yang tidak inklusif mempersempit ruang partisipasi masyarakat dalam memahami peran polisi perairan,

sehingga membentuk persepsi bahwa polisi perairan hanya menjangkau kelompok tertentu.

Sama seperti Ibu MK, Saudara DK (24 tahun), selaku masyarakat setempat, menjelaskan bahwa:

“Anak muda di sini jarang diajak bicara soal keamanan laut. Padahal kami juga aktif di media sosial. Mungkin kalau polisi bikin konten edukasi atau grup WhatsApp untuk nelayan muda, bisa lebih efektif nyampein informasi.” (wawancara pada tanggal 25 April 2025).

Menurut saudara Darius dapat dijelaskan bahwa ada potensi komunikasi digital yang belum dimanfaatkan oleh polisi perairan dengan maksimal. Informan menunjukkan bahwa penggunaan media sosial atau teknologi informasi bisa menjadi alternatif penyebaran informasi yang lebih cepat dan menjangkau kelompok muda.

Berdasarkan wawancara dari 5 (lima) informan di atas, dapat diuraikan bahwa faktor komunikasi dan informasi memainkan peran penting dalam membentuk persepsi positif masyarakat pesisir terhadap polisi perairan. Pendekatan komunikasi yang terbuka, edukatif, partisipatif, dan memanfaatkan media telah memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat pesisir, akan tetapi memang masih perlu untuk di maksimalkan, seperti keterbatasan interaksi langsung dengan pihak perempuan dan anak muda, serta inovasi dalam penyampaian informasi masih perlu untuk lebih dimaksimalkan.

Interaksi sosial pada masyarakat pesisir. Turut mendorong persepsi positif. Pendekatan yang humanis dan non-formal,

seperti turut hadir dalam kegiatan sosial, memperkuat ikatan emosional antara aparat dan warga.

Menurut Bapak IS (38 tahun), selaku anggota Polisi Perairan, beliau mengatakan bahwa:

“Kita sebagai Polisi perairan di sini sering datang ketempat warga, kadang ikut kumpul di balai desa atau sekadar ngobrol di warung kopi, dan kita sering tanya kabar tentang kondisi laut atau hasil tangkapan mereka, tentang kendala dan permasalahan melaut. Kita melakukan hal tersebut agar masyarakat bisa lebih dekat dengan kita dan mereka dapat merasa bahwa kita juga bagian dari masyarakat, bukan orang luar.” (wawancara pada tanggal 24 April 2025).

Hasil wawancara dengan bapak IS menunjukkan interaksi sosial yang intens, informal, dan tidak kaku menciptakan hubungan emosional yang positif antara polisi perairan dan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa diterima dan dihargai, sehingga persepsi terhadap kehadiran polisi tidak hanya sebagai aparat, tapi juga sebagai bagian dari komunitas pesisir.

Sama dengan yang diungkapkan oleh Bapak RM (36 tahun), selaku masyarakat setempat, bahwa :

“Saya merasa sekarang polisi perairan lebih dekat dengan masyarakat, mereka sering ikut kumpul kegiatan desa seperti kerja bakti atau ada acara keagamaan, mereka hadir. Jadi kami tidak canggung lagi kalau mau menyampaikan masalah atau laporan. Malah ada yang kami sudah anggap seperti saudara.” (wawancara pada tanggal 24 April 2025).

Dengan pernyataan diatas menunjukkan bahwa Interaksi sosial yang rutin dan informal seperti ikut berkumpul dalam kegiatan warga menciptakan kedekatan emosional. Masyarakat merasa dihargai dan diperlakukan sebagai mitra, bukan objek pengawasan. Ini meningkatkan persepsi positif terhadap keberadaan polisi perairan.

Sedangkan menurut Saudara DK (24 tahun), selaku masyarakat setempat, mengatakan bahwa:

“Saya tidak pernah terlibat dalam kegiatan sosialisasi mereka, sepertinya mereka lebih banyak interaksi sama nelayan tua. Anak muda jarang diajak atau dilibatkan. Coba sesekali bikin kegiatan yang libatkan anak muda. Misalnya pelatihan keselamatan laut atau edukasi soal sampah laut. Biar kita juga peduli dan paham akan tugas mereka”. (wawancara pada tanggal 25 April 2025).

Minimnya interaksi dengan kelompok usia muda berdampak pada kurangnya pemahaman generasi muda tentang peran polisi perairan. Interaksi lintas usia dan komunitas perlu ditingkatkan agar persepsi positif terbentuk sejak dini.

Berdasarkan wawancara dari 3 (tiga) informan, bahwa interaksi sosial berperan besar dalam membentuk persepsi positif masyarakat pesisir terhadap polisi perairan. Interaksi yang dilakukan secara rutin, informal, dan partisipatif menjadikan polisi perairan tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra sosial masyarakat. Kehadiran mereka dalam berbagai aspek kehidupan warga memperkuat rasa kedekatan,

kepercayaan, dan penghargaan terhadap institusi tersebut.

Keamanan dan Penegakan Hukum.

Peran polisi perairan dalam menjaga keamanan laut dari pencurian ikan, illegal fishing, dan pelanggaran wilayah laut, sangat dihargai oleh masyarakat. Ketegasan dalam penindakan hukum dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap hak nelayan lokal.

Hal tersebut sama dengan yang diungkapkan bapak GH (33 tahun), selaku Kepala Kelompok Nelayan mengatakan bahwa:

“Polisi perairan sering kasih informasi lewat grup WhatsApp nelayan kampung. Jadi kami bisa tahu kalau ada hujan atau ombak besar, peringatan cuaca, atau kegiatan pelatihan. Informasinya cepat dan jelas. Jadi kami merasa aman dan terlindungi dengan adanya mereka.” (wawancara pada tanggal 25 April 2025).

Hasil wawancara yang disampaikan bapak GH dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi oleh polisi perairan, dinilai sangat efektif dalam meningkatkan rasa aman masyarakat pesisir. Informasi yang cepat dan jelas mengenai kondisi cuaca, peringatan dini, maupun kegiatan pelatihan menunjukkan adanya komunikasi yang responsif dan preventif.

Menurut Bapak S (37 tahun), selaku masyarakat setempat, mengatakan bahwa:

“Yang saya suka, mereka nggak langsung marah kalau ada yang salah. Mereka kasih tahu dulu, baru kalau diulang terus ya ditindak. Jadi ada rasa keadilan bagi kita dan apabila ada keributan antar nelayan soal batas

tangkap dan penggunaan bom laut, sekarang sudah jarang karena mereka membantu mediasi dan beri pemahaman hukum” (wawancara pada tanggal 25 April 2025).

Dari wawancara diatas, menunjukkan bahwa masyarakat mendukung upaya penertiban, asalkan dilakukan dengan adil dan transparan. Ia percaya bahwa keberadaan polisi perairan justru membantu masyarakat kecil untuk terlindungi dari praktik ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Bapak PS (31 tahun), selaku masyarakat setempat mengatakan bahwa :

“Polisi Perairan yang sering berpatroli diperairan, membuat kita sangat terbantu dalam menjaga wilayah tangkap dari gangguan kapal asing dan penangkapan ikan ilegal. Jadi kita merasa lebih aman saat melaut” (wawancara pada tanggal 25 April 2025)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa kegiatan patroli rutin yang dilakukan oleh Polisi Perairan memberikan dampak nyata dalam menjaga wilayah tangkap nelayan dari ancaman kapal asing dan praktik penangkapan ikan ilegal. Kehadiran mereka di perairan menciptakan rasa aman bagi nelayan lokal saat melaut serta memperkuat perlindungan terhadap sumber daya laut. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan Polisi Perairan dipersepsi sebagai bentuk dukungan nyata dalam menjaga kedaulatan wilayah dan keamanan ekonomi masyarakat pesisir.

Berdasarkan wawancara dengan 3 (tiga) informan, dapat disimpulkan bahwa keamanan dan penegakan hukum sangat berperan besar dalam membentuk persepsi positif masyarakat

pesisir terhadap polisi perairan. Keamanan dan penegakan hukum yang dilakukan, memberikan dampak langsung terhadap bagi para nelayan mulai dari Kehadiran yang aktif dan nyata oleh Polisi Perairan yang rutin melakukan patrol, sehingga memberikan rasa aman bagi nelayan.

Peningkatan ketertiban dan kesadaran hukum yang mana sebelumnya dilakukan mediasi konflik dan pembinaan hukum berkontribusi terhadap pengurangan konflik dan pelanggaran. Hal ini memperkuat persepsi positif masyarakat bahwa kehadiran Polisi Perairan tidak hanya bersifat pengawasan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan dan pelayanan aktif kepada nelayan.

Maka dapat ditarik kesimpulan dari segi komunikasi dan informasi, interaksi social, keamanan dan penegakan hukum, bahwa persepsi masyarakat pesisir terhadap peran Polisi Perairan dalam menjaga keamanan laut di Kelurahan Warmon Kabupaten Sorong cenderung **positif**. Persepsi yang positif tersebut menjadikan modal sosial dalam membangun kemitraan yang sinergis antara masyarakat pesisir dan polisi perairan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Faktor Pendorong Persepsi Masyarakat Pesisir Terhadap Peran Polisi Perairan

Faktor pendorong persepsi masyarakat pesisir terhadap polisi perairan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara sosial, psikologis, maupun kultural. Persepsi masyarakat pesisir terhadap peran Polisi

Perairan dalam menjaga keamanan laut tidak terbentuk secara instan, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Beberapa faktor utama yang mendorong terbentuknya persepsi tersebut, antara lain: pengalaman langsung, lingkungan social, pengaruh media massa dan media sosial, dan Nilai-nilai dan budaya local.

Pengalam Langsung. Pengalaman langsung masyarakat pesisir dengan polisi perairan menjadi faktor penting yang mempengaruhi persepsi. Masyarakat yang pernah berinteraksi langsung dengan polisi perairan akan cenderung memiliki persepsi yang lebih jelas dan konkret terhadap keberadaan polisi perairan.

Bapak GH (33 tahun), selaku Ketua Kelompok Nelayan, menyampaikan bahwa ia merasa aman dengan adanya kehadiran polisi perairan, beliau menuturkan :

“Polisi perairan sering patroli diperairan sini, jadi saya merasa lebih tenang waktu melaut kadang mereka mampir ke perahu, tanya kondisi, bahkan bantu saat mesin saya mati. Saya juga pernah melihat mereka membantu memediasi nelayang yang sedang berkonflik. Saya merasa aman dan terlindungi dengan adanya mereka”.

Hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa pengalaman akan kehadiran polisi perairan tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pihak yang memberikan rasa aman secara langsung.

Sama dengan yang diceritakan oleh Bapak GH, Bapak EK (67 tahun), selaku Ketua Adat, mengatakan bahwa :

“Polisi perairan sangat aktif dalam memberikan sosialisasi terkait hukum laut, keselamatan saat di laut. Bahkan saat kita melaut, mereka kadang mampir memberikan edukasi soal penangkapan ikan seperti kalau menangkap ikan jangan menggunakan bom laut, sebab akan merusak laut dan merugikan kita”.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa kehadiran langsung polisi perairan di lapangan memberikan rasa aman sekaligus edukasi bagi para nelayan. Menurut Bapak RM (36 tahun), selaku masyarakat setempat dan menyampaikan bahwa :

“Mereka ramah, suka ngobrol bersama kita kalau istirahat. Kadang ikut kumpul ngopi diwarung kopi.. Masyarakat jadi gak takut, malah senang ada mereka di sekitar.”

Pengalaman ini menegaskan bahwa kedekatan emosional yang dibangun oleh polisi perairan melalui interaksi social bersama dengan warga berdampak positif terhadap citra dan penerimaan masyarakat.

Dari ketiga (3) informan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengalaman langsung masyarakat pesisir dengan Polisi Perairan, baik melalui bantuan teknis, penyuluhan, penyelesaian konflik maupun interaksi social, telah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polisi Perairan. Jadi keterlibatan langsung Polisi Perairan dalam kegiatan masyarakat memperkuat kepercayaan publik dan membentuk persepsi positif terhadap Polisi Perairan.

Lingkungan Sosial. Lingkungan sosial memiliki peran penting dalam membentuk komunikasi interpersonal antara masyarakat pesisir dan Polisi Perairan. Hubungan sosial

yang terjalin dalam komunitas pesisir yang cenderung akrab, terbuka, dan saling mengenal memudahkan terjadinya komunikasi yang bersifat personal antara warga dan aparat keamanan. Komunikasi semacam ini dapat memperkuat atau bahkan membentuk opini masyarakat secara kolektif baik yang bersifat positif maupun negatif.

Menurut Bapak EK (67 tahun), selaku Tokoh Adat, menyampaikan bahwa :

“Mereka sering datang bukan hanya untuk tugas, tapi juga ngobrol dengan warga. Kalau ada acara di kampung, mereka diundang dan datang. Itu bikin masyarakat merasa dekat dan gak ada jarak.. Kadang juga kita mendapatkan bantuan sosial dari mereka seperti sembako. Karena seringnya ketemu, komunikasi jadi lancar. Kami sudah menganggap mereka bagian dari warga juga”.

Pernyataan diatas menegaskan bahwa keterlibatan sosial polisi perairan dalam kegiatan masyarakat memperkuat jalinan komunikasi interpersonal yang terbentuk dalam suasana kekeluargaan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang terbuka. Hal ini dapat memberikan citra positif.

Sama dengan yang disampaikan oleh Bapak PS (31 tahun), selaku masyarakat setempat, menyampaikan bahwa :

“Waktu kita sedang persiapan berangkat, dan kita bertemu atau berpapasan mereka sering tegur dan sapa kita, terus kita juga sering dikasih info terkait perkiraan cuaca melalui grup whatsapp, atau ingatkan soal keselamatan. Kita juga bisa tanya langsung kalau ada yang bingung. Jadi kita merasa di perhatikan oleh mereka”

Kedua informan menggambarkan bahwa komunikasi interpersonal antara masyarakat dan Polisi Perairan terjadi secara alami dalam lingkungan sosial yang mendukung. Kedekatan sosial ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah yang membangun, sehingga memperkuat kepercayaan positif masyarakat terhadap peran Polisi Perairan.

Media Massa dan Media Sosial.

Pengaruh media massa dan media sosial turut memberikan kontribusi dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Polisi Perairan. Pemberitaan mengenai kegiatan, prestasi, maupun kasus yang melibatkan polisi perairan sangat mempengaruhi cara masyarakat menilai lembaga tersebut. Informasi yang beredar tersebut akan membentuk persepsi masyarakat pesisir terhadap Polisi Perairan secara positif maupun negatif.

Menurut Ibu MK (27 tahun), selaku masyarakat setempat, mengatakan bahwa :

“Saya pernah lihat postingan di Facebook dan grup Whasapp, bahwa Ada foto polisi air ikut bersih-bersih pantai bareng warga dan saya juga melihat sendiri kalau mereka tidak malu untuk bekerjasama dengan warga dalam kegiatan di kampung Jadi saya pikir mereka peduli juga sama lingkungan.”

Penggunaan media sosial dalam bentuk grup komunitas berperan sebagai ruang berbagi informasi yang efektif. Dokumentasi kegiatan bersama antara warga dan polisi perairan meningkatkan kesadaran kolektif tentang kolaborasi yang harmonis.

Sedangkan menurut Bapak GH (33 tahun), selaku Ketua Kelompok Nelayan, menyampaikan bahwa :

“Kami kadang dibantu polisi perairan untuk sosialisasi aturan penangkapan ikan. Mereka kirimkan materi lewat WhatsApp, lalu kami teruskan ke grup nelayan. Informasinya jelas dan cepat.”

Penggunaan media sosial dapat dikatakan sebagai alat komunikasi langsung antara Polisi Perairan dan masyarakat memperkuat interaksi dua arah. Hal ini menegaskan bahwa media digital juga menjadi saluran resmi dalam menjalin komunikasi yang produktif.

Bapak RM (36 tahun), selaku masyarakat setempat, menyampaikan bahwa :

“Kami sering share ulang postingan polisi air dari akun facebook atau Instagram mereka. Masyarakat jadi tahu kalau mereka ada kegiatan sosial juga, bukan cuma patroli.”

Dapat dijelaskan dari pernyataan diatas, bahwa media sosial seperti Facebook dan Instagram menjadi alat penyebaran citra positif yang memperlihatkan sisi humanis dan proaktif dari polisi perairan.

Berdasarkan wawancara terhadap tiga informan, ditemukan bahwa media massa dan media sosial memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat pesisir terhadap Polisi Perairan. Masyarakat menerima informasi dari berbagai sumber seperti, grup WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Media sosial terbukti mampu mempercepat penyebaran informasi dan membentuk citra positif apabila dikelola

secara aktif dan transparan oleh pihak Polisi Perairan.

Nilai-nilai dan budaya local. Latar belakang sosial budaya dan nilai-nilai lokal pada masyarakat pesisir juga menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, gotong royong, dan rasa saling percaya, Polisi Perairan yang mampu menjalin hubungan emosional dan sosial yang baik akan lebih dihargai dan diterima kehadirannya.

Menurut Bapak EK, (67 tahun), selaku Tokoh Adat menyampaikan bahwa :

“Kami punya aturan adat soal laut, dan mereka menghormati itu. Mereka juga sering diskusi dengan saya dan kami di sini masih menjunjung tinggi adat. Kalau ada kegiatan di laut, biasanya kami juga sampaikan ke mereka. Serta mereka juga sering minta izin atau berkoordinasi dengan kami dulu. Menurut saya, itu bentuk penghormatan dan membuat kami merasa dihargai.”

Penghargaan dan penghormatan terhadap nilai local dan adat istiadat local oleh Polisi Perairan dianggap sebagai bentuk kepekaan budaya yang mempererat hubungan social.

Menurut Bapak S (37 tahun), selaku masyarakat setempat menyampaikan bahwa :

“Kami percaya laut itu bukan hanya tempat cari makan, tapi juga punya roh. Kalau polisi air ikut menjaga laut, kami anggap mereka bagian dari pelindung alam juga.”

Pernyataan ini menunjukkan adanya kearifan lokal terkait hubungan spiritual dengan laut, yang dapat selaras dengan peran Polisi Perairan dalam menjaga ekosistem laut.

Menurut Bapak GH (33 tahun), selaku Ketua Kelompok Nelayan menyampaikan bahwa :

“Kami punya nilai saling percaya. Kalau polisi air transparan dalam tindakan mereka, masyarakat akan dukung. Tapi kalau ada kesan menutup-nutupi, masyarakat jadi curiga.”

Nilai keterbukaan (transparansi) menjadi landasan penting dalam membangun kepercayaan yang berkelanjutan antara masyarakat dan aparat.

Dari tiga wawancara tersebut menunjukan bahwa nilai-nilai lokal seperti penghormatan terhadap adat, keterbukaan, serta rasa kekeluargaan sangat memengaruhi cara masyarakat pesisir berinteraksi dengan polisi perairan. Polisi Perairan mampu memahami dan menyesuaikan pendekatannya dengan nilai-nilai budaya lokal cenderung lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat pesisir terhadap peran Polisi Perairan dalam menjaga keamanan laut di Kelurahan Warmon Kabupaten Sorong cenderung positif. Persepsi yang positif tersebut menjadikan modal sosial dalam membangun kemitraan yang sinergis antara masyarakat pesisir dan polisi perairan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Selain itu dari faktor pendorong persepsi masyarakat Polisi Perairan mampu memahami dan menyesuaikan

pendekatannya dengan nilai-nilai budaya local, sehingga mereka cenderung lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat pesisir

DAFTAR PUSTAKA

- Aprizal, R. A., Sriono, S., & Toni, T. (2024). The effectiveness of the duties and functions of the Air and Water Police (Polairud) in the Rokan Hilir Police Station. *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 2(2).
- Bueger, C. (2015). What is maritime security?. *Marine policy*, 53, 159-164.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Danial, D. (2015). Terobosan Kreatif Kepolisian Perairan Polda Banten dalam Pelaksanaan Pemeliharaan Keamanan Masyarakat dan Penegakan Hukum di Perairan Selat Sunda. *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2).
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2011). *The Sage handbook of qualitative research*. sage.
- Gilovich, T., Keltner, D., Chen, S., & Nisbett, R. E. (2018). *Social psychology*. WW Norton & Company.
- Firmansyah, D. (2025). Penguatan Partisipasi Masyarakat Pesisir dalam Pengawasan Penyelundupan Narkotika Melalui Jalur Laut. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 5(2), 143-158.
- Jamilah, A., & Disemadi, H. S. (2020). Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982. *Mulawarman Law Review*, 5(1), 29-46.
- Hekin, S. S., Samara, F., & Arman, Y. (2025). Hambatan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pemboman Ikan di Wilayah Hukum Perairan Laut Kabupaten Flores Timur. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7850-7854.
- Kusumastanto, T., & Wahyudin, Y. (2012). Pembinaan Nelayan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Perikanan Nasional (Fishermen Capacity Building as a Spearhead of the National Fisheries Development). *Wawasan TRIDHARMA Majalah Ilmiah Bulanan Kopertis Wilayah IV Nomor, 1*.
- Marasabessy, I., Basri, L., Badarudin, M. I., & Bahalwan, F. (2023). Indeks Sentralitas Masyarakat Pesisir pada Gugus Kepulauan dengan Pusat Layanan Wilayah di Pulau Induk (Studi Kepulauan Arar Kabupaten Sorong Papua Barat Daya). *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 7(4), 369-379.
- Maruf, I. R. (2024). The Importance of Digital Transformation in Maritime Law Enforcement at Sea. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 14(02), 118-127.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ningtyas, D. C. A., Rahmadanik, D., & Soesiantoro, A. (2025). Analisis Kualitas Pelayanan Publik Direktorat Kepolisian Air Dan Udara Polda Jawa Timur Terhadap Masyarakat Nelayan Pesisir Di Wilayah Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya. *Praja observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (e-ISSN: 2797-0469), 5(03), 98-107.
- Runtukahu, J. (2016). Tanggung Jawab Polisi Perairan dalam Penegakan Hukum di Wilayah Laut Teritorial Republik Indonesia. *Lex et Societatis*, 4(1).
- Saifulloh, P. P. A., & Simabura, C. (2023). Penataan lembaga pengamanan dan penegakan hukum laut berdasarkan cita hukum Pancasila. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(3).

Sarjito, A. (2023). Peran teknologi dalam pembangunan kemaritiman Indonesia. *Jurnal Lemhannas RI*, 11(4), 219-236.

Skogan, W. G. (2006). Asymmetry in the impact of encounters with police. *Policing & society*, 16(02), 99-126.

Tyler, T. R. (2004). Enhancing police legitimacy. *The annals of the American academy of political and social science*, 593(1), 84-99.

PROFIL SINGKAT

Ronny Eduardo Zadrak Osok. Merupakan mahasiswa S1-Sosiologi UNAMIN yang telah menyelesaikan studi akhir lewat jalur RPL, selain itu aktif di lembaga Kepolisian Perairan (Polair) Papua Barat Daya.